

STRUKTUR FUNDAMENTAL DAN KINERJA PEREKONOMIAN JAWA TENGAH: PENDEKATAN MODEL SISTEM NERACA SOSIAL EKONOMI

P. Eko Prasetyo *)

Abstract

Measurement of local economic performance is one requirement to improve quality of policy and quality of social living. This study aimed to know fundamental structure and local economic performance of Central Java in proper and objective way through Social Accounting Matrix (SAM) analysis approach. Based on data of Statistic BPS and SAM, performance of economic growth at Central Java indicated positive improvement between sector, unless in agriculture. In addition, performance of economic growth at Central Java has been able to improve income per capita from 2000 to 2006. However, the economic growth performance has not been quality, so that distribution of income per capita improvement has not distribute evenly between group, and it was not effective to diminish unemployment and poverty problems happened. Next, investment policy as a main motor of economic growth through production sector had biggest positive impact, especially in financial institution and trade sector, while investment impact for industrial and agricultural sector especially in food crop and food industry was still low.

Keywords: *System Social Accounting Matrix approach, fundamental structure and economic performance*

Pendahuluan

Secara makro, struktur fundamental dan kinerja perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari kinerja dan nilai tambah sektor ekonomi yang menjadi *leading sector* pada daerah tersebut. Untuk perekonomian daerah Jawa Tengah, secara makro ekonomi dapat dilihat dari sektor; industri, pertanian, keuangan dan perdagangan, yang telah menjadi *leading sector* perekonomian Jawa Tengah selama ini. Berdasarkan kinerja tersebut, masalah dan kebijakan pembangunan terutama mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), distribusi, nilai tambah, analisis dampak *output*, pendapatan perkapita, penyerapan tenaga kerja, serta keterkaitan antar sektor dari variabel sosial-ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan dapat dikaji. Selanjutnya, berdasarkan kinerja tersebut, dapat direkomendasikan untuk formulasi kebijakan guna mengatasi permasalahan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.

Masalah kemiskinan, pengangguran dan pemerataan distribusi pendapatan merupakan masalah pokok yang teramat penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya di propinsi Jawa Tengah. Sejak tiga dasa warsa yang lalu, berbagai analisis ekonomi telah dilakukan untuk mengamati apakah sebuah kebijakan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan dan membuat distribusi

*) Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang

pendapatan semakin merata di suatu negara. Model *Social Accounting Matrix* (SAM) atau Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) merupakan salah satu sistem pendekatan dan juga alat analisis penting yang dikembangkan untuk memantau serta menganalisis masalah kemiskinan dan distribusi pendapatan di berbagai negara, (Sadoulet, 1995:273, Sartika, 2005:1; Djoni, 2005:1).

Tujuan umum analisis SNSE yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan struktur fundamental ekonomi dan kinerja ekonomi-sosial, untuk dapat menjelaskan tentang kemiskinan, pengangguran dan distribusi pendapatan di wilayah Jawa Tengah. Target khususnya; (1) menunjukkan dan mengidentifikasi struktur fundamental ekonomi serta menganalisis keterkaitan antara kinerja ekonomi-sosial dengan masalah distribusi pendapatan dan ketenagakerjaan. (2) Menganalisis dampak pengganda SNSE dan berbagai model simulasi sebagai salah satu opsi yang penting untuk formulasi kebijakan yang dilakukan pemerintah propinsi Jawa Tengah, khususnya masalah investasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonominya.

Tujuan utama kebijakan setiap daerah yang sedang membangun diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Masalah pokok yang dihadapi daerah yang sedang membangun adalah kesejangan antarsektor, antardaerah, antargolongan, ketimpangan distribusi pendapatan serta masalah kemiskinan dan pengangguran. Semua masalah tersebut saling terkait dan sulit untuk dipecahkan secara terpisah.

Dalam perekonomian Indonesia, pemerintah merupakan pengambil keputusan utama kebijakan. Tujuannya untuk menghilangkan berbagai masalah pokok di atas agar setiap anggota masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara merata dan adil. Pokok masalahnya adalah, mengapa problema tersebut masih terjadi? Bagaimana cara penanggulangannya? Apakah struktur fundamental perekonomian daerah belum dikembangkan? Mengapa masyarakat masih merasakan adanya kebijakan pemerintah yang kurang tepat sasaran? Bagaimana kaitan antara pengembangan struktur fundamental dengan kinerja perekonomian di daerah tersebut? Studi komperhensif aplikasi model SNSE merupakan inti dari penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mencari jawaban yang lebih tepat dan akurat dari berbagai masalah di atas, sehingga diperoleh suatu model baru yang lebih baik dan kondusif sebagai salah satu alternatif yang tepat untuk direkomendasikan kepada pengambil kebijakan.

Kajian Teori

Konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan semakin kuat bergema. Dengan demikian, konsep pembangunan yang dikembangkan harus konsep pembangunan yang memiliki arti tidak menurunkan kapasitas generasi yang akan datang untuk melakukan perbaikan. Artinya, konsep pembangunan harus dapat diwujudkan untuk meniadakan atau mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan, (Mudrajad, 1997; Gunawan, 1998).

Sekarang ini, kecenderungan pembangunan di Indonesia dalam berbagai sektor dan wilayah sering dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi, kurang mampu mengatasi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan. Kinerja pertumbuhan dan pembangunan ekonomi cenderung baik,

tetapi pemerataan antarsektor, antargolongan dan antardaerah dirasakan oleh masyarakat kurang berhasil. Padahal, proses pembangunan yang berkelanjutan mensyaratkan; (1) mengikutkan semua anggota masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, (2) setiap anggota masyarakat harus mendapatkan imbalan yang sesuai dengan pengorbanannya, (3) adanya tenggang rasa di antara anggota masyarakat, dan selalu menjaga keseimbangan.

Gejala-gejala tersebut menandakan pembangunan daerah yang telah dan sedang dilaksanakan tidak memiliki keterkaitan positif dengan kelestarian lingkungan, antar sektor, golongan dan daerah. Kesenjangan antarsektor misalnya, dapat diamati dari komposisi sumbangan tiap sektor dalam transformasi struktural kegiatan ekonomi di daerah. Adanya perusakan sumber daya alam yang sering dilakukan di daerah, sekarang menyebabkan ekonomi biaya tinggi terjadi. Hal tersebut menandakan bahwa aktivitas produksi yang kini berlangsung perlu dikaji kembali. Keterkaitan aktivitas produksi yakni; antar faktor produksi, kegiatan produksi dan institusi yang terkait perlu di teliti dan di tata kembali menuju ke arah yang lebih baik, efisien dan kondusif.

Studi ekonomi yang menganalisis struktur perekonomian suatu negara dengan menggunakan model SAM atau SNSE telah banyak dilakukan. Sebelumnya, pendekatan sistem analisis indeks keterkaitan dengan aplikasi model SNSE mulanya dikembangkan oleh Rasmusen (1956) dan Hirschman (1958) dalam (Djoni, 2005), untuk melihat keterkaitan antar sektor terutama untuk menentukan strategi kebijakan pembangunan. Konsep ini kemudian diperbaiki oleh Cella (1984) dan diterapkan oleh Clements dan Rosi (1991). Kemudian, dikenal dua keterkaitan yakni; keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) yang merupakan kaitan dengan bahan mentah (input) dan dihitung menurut kolom, dan keterkaitan ke depan (*forward linkages*) yang merupakan keterkaitan penjualan barang jadi (*output*) dan dihitung menurut baris. Sistem ini selanjutnya lebih dikenal sebagai model *Input-Output* (I-O).

Studi Pyatt dan Round (1979) dalam Djoni (2005) telah menggunakan matriks pengganda SNSE menjadi pengganda *transfer*, *open loop* dan *closed loop* untuk tujuan menguraikan struktur perekonomian suatu negara. Sadoulet, and de Janvery, (1995: chapter 10), menganalisis struktur perekonomian Maroko pada tahun 1980 dengan aplikasi model SAM atau SNSE. Sadoulet juga menggunakan model pengganda *Input Output* (I-O) dan pengganda SNSE untuk membuat formasi kebijakan dan dampaknya terhadap perekonomian Maroko. Andi, (2003) telah menggunakan aplikasi model SAM untuk menganalisis peran Asean dalam perdagangan global. Selanjutnya, Andi dan Daniel (2004), menganalisis dampak subsidi langsung untuk rumah tangga petani di Indonesia dengan menggunakan aplikasi model SAM dan aplikasi CGE model.

Di samping itu, model SNSE juga dapat digunakan untuk melihat keterkaitan antar sektor kunci & sektor fundamental dari struktur ekonomi di suatu perekonomian. Sebelumnya, di Indonesia, Sritua Arief (1981) telah menggunakan model (I-O) untuk meneliti sektor-sektor kunci (*key sector*) dalam ekonomi Indonesia. Alaudin (1986) telah mengidentifikasi sektor-sektor kunci dalam perekonomian Bangladesh dengan pendekatan keterkaitan antar sektor. Muchdie dan M Handry Imansyah (1995) menerapkan analisis keterkaitan dalam analisis sektor-sektor unggulan pada perekonomian Indonesia. Sementara itu, berbagai studi yang mempermasalahkan dampak lingkungan pada perdagangan juga sudah

lama ada. Misalkan, Sieber, (1997, 1985); Peting (1976); Mc Guire (1982); Boumol and Oates (1988); Blackhurst (1977) menyimpulkan hasil utama studi impak kebijakan lingkungan terhadap keunggulan komparatif negara tersebut. Namun, penggunaan analisis dampak lingkungan dan penggunaan pendekatan SNSE tersebut umumnya masih terpisah. Dengan demikian, sepengetahuan peneliti, model SNSE adalah penting untuk menganalisis struktur ekonomi dan kinerja perekonomian serta dampaknya terhadap lingkungan, dan penelitian secara khusus di wilayah Jateng dengan menggunakan model SNSE belum pernah ada yang melakukannya, maka aplikasi model SNSE dan obyek serta subyek penelitian ini dapat dikatakan masih orisinal untuk dilakukan penelitian.

Model analisis SNSE merupakan salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk mengkaji berbagai aktivitas produksi antar sektor, antar negara, wilayah, daerah atau kota, (Sadoulet, 1995, Andi, 2005; Aris, 2005). Model SNSE adalah sebuah neraca ekonomi masukan ganda tradisional berbentuk matriks partisi yang mencatat segala transaksi ekonomi antar agen, terutama sekali antar sektor-sektor di dalam blok produksi, sektor-sektor di dalam blok institusi (termasuk rumah tangga), dan sektor-sektor di dalam blok faktor produksi, di suatu perekonomian (Pyatt dan Round, 1979; Hartono dan Resosudarmo, 1998) dalam Sartika (2005) dan Djoni (2005).

Dalam studi ini, model SNSE akan dimanfaatkan untuk menganalisis struktur dan kinerja perekonomian Jateng, yang secara simultan tercermin dalam blok-blok; faktor produksi, institusi dan kegiatan produksi. Dengan demikian; (1) model SNSE akan digunakan untuk merangkum seluruh kegiatan transaksi ekonomi yang terjadi di perekonomian Jateng, serta untuk mendiskripsikan dengan mudah dan tepat mengenai struktur fundamental ekonomi Jateng, (2) untuk memotret struktur dan kinerja sosial-ekonomi di suatu perekonomian Jateng, guna mendiskripsikan tentang kemiskinan, pengangguran dan distribusi pendapatan di perekonomian daerah tersebut.

Di samping itu, penggunaan model SNSE dalam penelitian ini merupakan alat yang penting untuk menunjukkan dan menganalisis dengan baik dampak dari suatu kebijakan ekonomi terhadap pendapatan masyarakat, dan dapat diketahui dampak pengganda dari suatu kebijakan ekonomi pemerintah Jateng terhadap penanggulangan berbagai masalah pembangunan yang dimaksud. Melalui model matriks pengganda SNSE dapat ditunjukkan pula dampak dari suatu kebijakan terhadap berbagai sektor di dalam suatu perekonomian Jateng, termasuk dampak sebuah kebijakan terhadap pendapatan masyarakat, *output* dan tenaga kerja dalam jangka pendek dan panjang.

Metode Penelitian

Model pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah model SNSE atau SAM (*Social Accounting Matrix Model*), yaitu model yang dapat menjelaskan keterkaitan kinerja ekonomi-sosial antar sektor secara terpadu. Penggunaan neraca SNSE dapat menunjukkan perubahan pendapatan yang terjadi pada variabel endogen tertentu jika ada injeksi atau stimulus kebijakan investasi pada neraca eksogen, (Bautista, 1999, Djoni, 2005). Karena itu, kerangka data yang disusun dalam bentuk model matriks yang merangkum beberapa variabel ekonomi dan sosial secara intergal dalam model dasar SNSE begitu penting untuk dikaji terlebih

dahulu. Sebab, model neraca SNSE dapat memberikan gambaran umum perekonomian Jateng dan keterkaitannya antar variabel ekonomi dan sosial pada suatu kurun waktu tertentu (periode penelitian). Tujuan kerangka data SNSE secara umum adalah untuk memberikan gambaran kinerja fundamental ekonomi-sosial Jawa Tengah, dan secara khusus untuk menunjukkan keterkaitan antar kinerja ekonomi-sosial dengan masalah distribusi pendapatan, ketenagakerjaan serta dampak kebijakan investasi daerah. Dengan demikian, kerangka umum (struktur dasar) yang dimaksud dalam model SNSE ini dapat disusun dalam bentuk matriks seperti dalam tabel-1 di bawah ini.

Kerangka dasar model SNSE yang dimaksud dalam tabel-1 ini merupakan matriks yang merangkum neraca sosial-ekonomi secara menyeluruh. Neraca-neraca ekonomi-sosial tersebut dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yakni; kelompok neraca-neraca endogen dan kelompok neraca-neraca eksogen. Selanjutnya, secara garis besar, kelompok neraca-neraca endogen dan neraca-neraca eksogen tersebut di bagi menjadi tiga blok, yakni; blok-blok faktor produksi, blok-blok institusi dan blok-blok aktivitas (kegiatan) produksi. Selanjutnya, yang dikenal dengan blok faktor produksi, blok institusi dan blok kegiatan produksi ini lah yang dikaji dan dianalisis lebih mendalam dalam aplikasi model SNSE yang dimaksud.

Tabel-1: Struktur Dasar Umum SAM (SNSE)

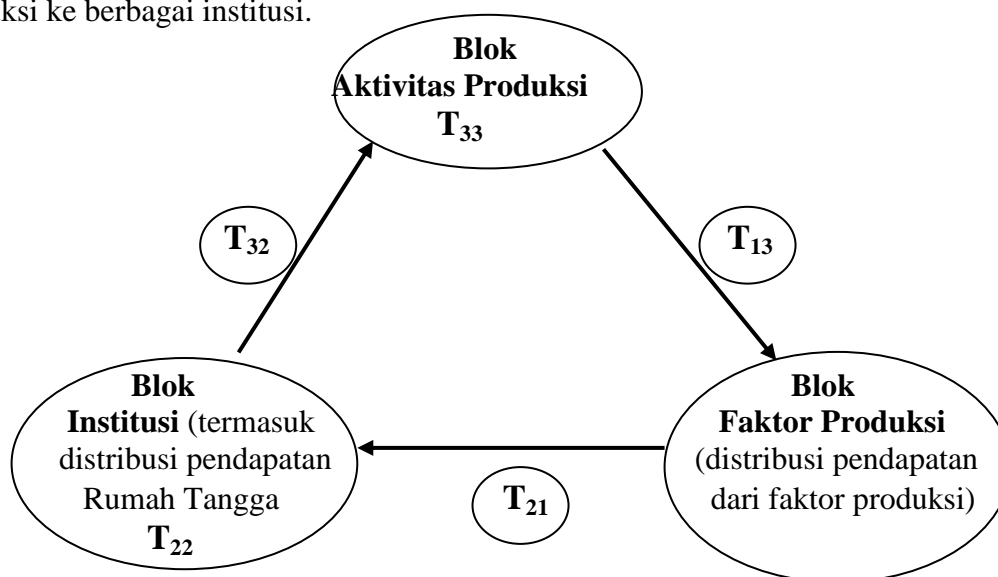
			PENGELUARAN (<i>Expenditures</i>)					
			Neraca Endogen			Neraca Eksogen	Total	
			Faktor Produksi	Institusi	Kegiatan Produksi			
			1	2	3	4	5	
PENERIMAAN (Revenue)	Neraca Endogen	Faktor Produksi	1	0	0	T_{13}	X_1	Y_1
		Institusi	2	T_{21}	T_{22}	0	X_2	Y_2
		Kegiatan Produksi	3	0	T_{32}	T_{33}	X_3	Y_3
	Neraca Eksogen		4	L_1	L_2	L_3	R	Y_4
	Total		5	Y'_1	Y'_2	Y'_3	Y'_4	

Sumber: Sadoulet, (1995); Sartika (2005); Djoni, (2005).

Selanjutnya, struktur dasar umum pembentukan model SNSE pada tabel-1 di atas adalah berbentuk matriks partisi yang berukuran 4 x 4. Baris menunjukkan penerimaan, sedangkan kolom menunjukkan pengeluaran. Pada tabel-1, sub matriks T_{ij} atau T_{21} digunakan untuk menunjukkan penerimaan neraca baris ke-i dari neraca kolom ke-j. Vektor Y_i menunjukkan total penerimaan neraca baris ke-

i , sebaliknya vektor Y^j menunjukkan total pengeluaran neraca kolom ke- j . Sesuai dengan ketentuan pada SNSE, vektor Y_i , sama dengan vektor Y^j . Dengan kata lain, Y^j merupakan vektor *transpose* dari Y_i , untuk setiap $i = j$. Untuk lebih mudah mengerti transaksi-transaksi ekonomi yang dicatat oleh sebuah model SNSE, dapat digambarkan dalam bentuk jalur keterkaitan ekonomi antar agen seperti dalam gambar-1 di bawah ini.

Pada gambar-1, menunjukkan transaksi ekonomi utama (fundamental) yang tercatat di dalam sebuah model SNSE (tanda panah menunjukkan arus uang). Submatriks T_{13} menunjukkan alokasi nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor produksi ke faktor-faktor produksi, sebagai balas jasa dari penggunaan faktor-faktor produksi tersebut. Misalnya, upah dan gaji sebagai balas jasa bagi penggunaan faktor produksi tenaga kerja, dan sebagainya. Submatriks T_{21} menunjukkan alokasi pendapatan faktor produksi ke berbagai institusi, yang umumnya terdiri dari rumah tangga, pemerintah dan perusahaan. Dengan kata lain, matriks ini merupakan matriks yang merekam distribusi pendapatan dari faktor produksi ke berbagai institusi.



Sumber : Thorbecke, 1988 dalam Sartika, (2005).

Gambar-1: Transaksi ekonomi antar agen di dalam sebuah perekonomian

Submatriks T_{22} menunjukkan transfer pembayaran antar institusi, misal pemberian subsidi dana BLT dari pemerintah kepada rumah tangga, pemberian subsidi dari perusahaan ke pada rumah tangga, atau pembayaran transfer dari rumah tangga ke rumah tangga lain. Submatriks T_{32} menunjukkan permintaan terhadap barang dan jasa oleh institusi, yakni menunjukkan uang yang dibayarkan pihak institusi ke sektor produksi untuk membeli barang dan jasa yang dikonsumsi. Selanjutnya, submatriks T_{33} menunjukkan permintaan barang dan jasa antar industri atau transaksi antar sektor produksi. Selain submatriks-submatriks tersebut, model SNSE juga mencatat submatriks transaksi ekonomi di sektor perbankan dan transaksi pihak luar negeri.

Model SNSE juga memberikan informasi mengenai struktur sosial suatu perekonomian, khususnya informasi struktur produksi, kondisi faktor produksi, distribusi pendapatan rumah tangga (berdasarkan kelompok sosial-ekonomi), dan pula pengeluaran berbagai institusi (termasuk kelompok rumah tangga yang

berbeda-beda). Selanjutnya, secara umum model SNSE merupakan pendekatan terbaik bagi kerangka perhitungan model keseimbangan umum yang tersedia bagi para peneliti ekonomi dan sosial (Thorbecke, 1985, 1988) dalam Djoni, (2005).

Menurut Deman (1991), mengukur indeks keterkaitan saja dianggap tidak cukup karena belum mencerminkan keragaman pengaruh ganda antar sektor. Untuk itu, indeks penyebaran perlu dihitung guna mengetahui keragaman ketergantungan antar sektor. Indeks penyebaran yang tinggi di sektor i berarti sektor i hanya tergantung pada satu atau beberapa sektor saja. Sedangkan, jika indeks penyebaran sektor i rendah, ini menggambarkan bahwa sektor i tergantung secara merata terhadap seluruh sektor dalam perekonomian. Kemudian, Deman (1991), Mujeri dan Alauddin (1994), menyarankan bahwa dalam menentukan sektor andalan, selain tingginya indeks keterkaitan juga harus diikuti dengan rendahnya indeks penyebaran. Indeks penyebaran langsung output, pendapatan dan kesempatan kerja yang dimaksud dalam penelitian ini nanti, secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$PBLQ_j = \frac{\sqrt{(1/n-1)\sum_i (a_{ij} - (1/n)(a_{ij})^2)}}{(1/n \sum_i a_{ij})}$$

$$PBLP_j = \frac{\sqrt{(1/n-1)\sum_i (a_{ij} p_i - (1/n)(a_{ij} p_i)^2)}}{(1/n \sum_i a_{ij} p_i)}$$

$$PBLT_j = \frac{\sqrt{(1/n-1)\sum_i (a_{ij} t_i - (1/n)(a_{ij} t_i)^2)}}{(1/n \sum_i a_{ij} t_i)}$$

Keterangan:

PBLQ_j adalah indeks penyebaran ke belakang langsung *output* sektor j,

PBLP_j, adalah indeks penyebaran ke belakang langsung pendapatan dari sektor j,

PBLT_j, adalah indeks penyebaran ke belakang langsung kesempatan kerja sektor j.

Namun demikian, secara umum indeks keterkaitan antar sektor hanya menunjukkan nilai indeks pemusatan dan indeks penyebaran dari koefisien-koefisien pada matriks tersebut. Oleh karena itu, analisis pengganda (dampak pengganda) perlu dikenalkan dalam analisis SNSE ini. Karena analisis pengganda SNSE mampu menelusuri rentetan pengaruh suatu sektor, baik secara langsung, secara tidak langsung maupun imbasan, terhadap sektor lainnya dan perekonomian secara keseluruhan. Analisis pengganda juga merupakan analisis yang paling populer dalam analisis I-O.

Selanjutnya, secara garis besar proses dalam penelitian ini diawali dari masalah penelitian dan diakhiri dengan suatu rekomendasi kebijakan. Artinya, penelitian ini harus dapat dikerjakan oleh tim peneliti, hasilnya untuk dapat dimanfaatkan sebagai rekomendasi kepada pemerintah serta dapat dinikmati oleh masyarakat. Sesuai dengan pokok masalah dan tujuan penelitian yang secara khusus; ingin mengidentifikasi struktur fundamental ekonomi serta menganalisis keterkaitan antara kinerja ekonomi-sosial dengan masalah; kemiskinan, distribusi pendapatan dan ketenagakerjaan, serta menganalisis dampak pengganda SNSE dan model simulasi untuk formulasi kebijakan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

Dengan demikian, model penelitian ini didesain riset dengan model desain riset analitik eksperimental. Desain riset analitik eksperimental yang dimaksud adalah: langkah *pertama* dimulai dari identifikasi variabel yang termuat dalam variabel neraca eksogen dan neraca endogen sebagai sumber pokok masalah, kemudian dijumpai dengan teoritisasi, operasionalisasi, pengumpulan data dan pengolahan data, analisis data serta formulasi dan penyimpulan, selanjutnya

diakhiri dengan rekomendasi. Dalam hal ini variabel dalam neraca eksogen diteliti sebagaimana adanya terlebih dulu tanpa simulasi dan selanjutnya setelah ada kebijakan disimulasi (dieksperiment).

Langkah kedua, setelah variabel tersebut diteliti apa adanya dan diketahui hasilnya. Selanjutnya, variabel tersebut dicoba untuk dieksperiment atau diperlakukan secara sadar untuk kemudian dilihat dampaknya terhadap variabel endogen yang dipantau atau teliti. Tahap berikutnya, hasil eksperimen tersebut dibandingkan dengan metode analitik awal tadi, kemudian setelah diketahui dampak positifnya, selanjutnya baru diformulasikan dan direkomendasikan. Secara garis besar, metode desain riset analitik-eksperimental yang dimaksud dapat dilihat pada tabel-2 di bawah ini.

Tabel-2: Disain Penelitian Riset Analitik-Eksperimental

Responden (Kelompok) (R)	Varabel Endogen (Vn)	Variabel Eksogen (Vk)	Variabel Endogen (Vn)	Keterangan
	Observasi (O)	Perlakuan (X)	Observasi (O)	
Kelompok Tes (Rt)	Observasi sebelum perlakuan (Ob)	Perlakuan (X)	Observasi sesudah perlakuan (Os)	Rt (Db : Ds) Rk (Db : Ds) Db (Rt : Rk) Ds (Rt : Rk)
	Data sebelum perlakuan (Db)		Data sesudah perlakuan (Ds)	
Kelompok Kontrol (Rk)	Observasi sebelum perlakuan (Ob)	Tidak ada perlakuan (-)	Observasi sesudah perlakuan (Os)	Rumus Rekomendasi Kebijakan : Rt (Db : Ds)
	Data sebelum perlakuan (Db)		Data sesudah perlakuan (Ds)	

Sumber : Pokok masalah dan tujuan penelitian di atas

Untuk kepentingan analisis dalam aplikasi model SNSE juga diperlukan nilai koefisien SNSE. Koefisien SNSE dapat diperoleh dari tabel neraca pendapatan dan pengeluaran. Oleh karena itu, untuk kepentingan analisis ini perlu disusun kembali model kerangka dasar analisis SNSE yang dimaksud seperti dalam tabel-3 di bawah ini. Analisis dengan koefisien SNSE ini pada akhirnya dapat digunakan sebagai dasar analisis simulasi kebijakan yang dieksperimentalkan. Tujuannya adalah mencari dampak negatif terkecil dari kebijakan yang diberikan untuk masyarakat.

Dari tabel-3 tersebut dapat dicari koefisien SNSE berdasarkan neraca pendapatan dan neraca pengeluaran sebagai berikut:

a. Neraca Pendapatan :

- 1). Pendapatan faktor produksi : $Y_1 = T_{13} + X_1$
- 2). Pendapatan institusi : $Y_2 = T_{21} + T_{22} + X_2$
- 3). Pendapatan produksi : $Y_3 = T_{32} + T_{33} + X_3$

b. Neraca Pengeluaran :

- 1). Pendapatan faktor produksi : $Y'_1 = T_{21} + L_1$
- 2). Pendapatan institusi : $Y'_2 = T_{22} + T_{32} + L_2$
- 3). Pendapatan produksi : $Y'_3 = T_{13} + T_{33} + L_3$

Selanjutnya koefisien SNSE dapat dihitung sebagai berikut:

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & T_{13} \\ T_{21} & T_{22} & 0 \\ 0 & T_{32} & T_{33} \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & 0 \\ 0 & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}$$

$$A_{ij} = \frac{T_{ij}}{Y_j}$$

Jika dalam analisis keterkaitan ke depan dan ke belakang yang dianalisis adalah nilai-nilai koefisien SNSE terbesar. Tetapi, nilai koefisien keragaman dalam koefisien SNSE yang digunakan justru adalah nilai koefisien keragaman terkecil, maka semakin kecil nilai koefisien keragaman dalam SNSE berarti semakin merata distribusi penyebaran output, pendapatan dan kesempatan kerjanya. Artinya, semakin kecil nilai koefisien keragaman berarti semakin kecil tingkat pengangguran dan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat.

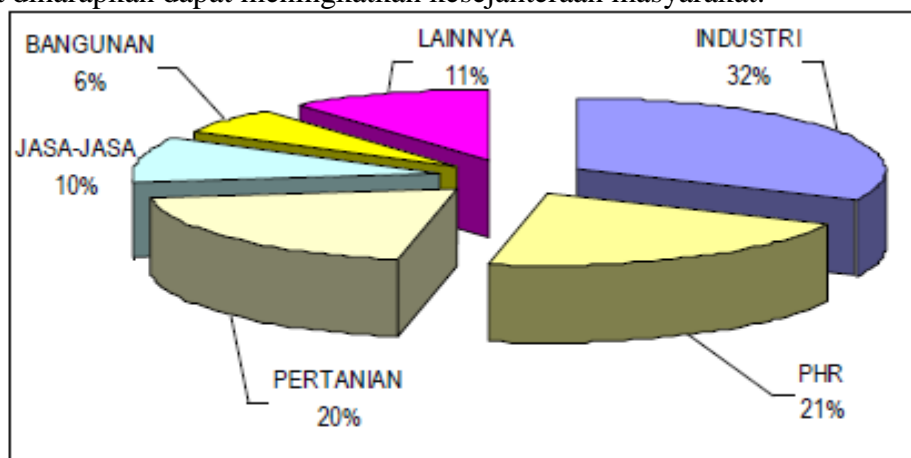
Tabel-3: Kerangka Dasar Analisis Model SNSE

				PENGELUARAN (Kolom)				
				Neraca Endogen			Neraca Eksogen	Total
				Faktor Produksi	Institusi	Kegiatan Produksi		
				1	2	3	4	5
PENERIMAAN (Baris)	Neraca Endogen	Faktor Produksi	1	0	0	T_{13} Distribusi Nilai Tambah (I-O)	X_1 Pendapatan Faktor Produksi Luar Negeri	Y_1 Distribusi Pendapatan Faktor Produksi
		Institusi	2	T_{21} Pendapatan Institusi dari Faktor Produksi	T_{22} Transfer Antar Institusi	0	X_2 Pendapatan Institusi dari Luar Negeri	Y_2 Distribusi Pendapatan Institusi
		Kegiatan Produksi	3	0	T_{32} Permintaan Akhir Domestik (I-O)	T_{33} Transaksi Antar Kegiatan (I-O)	X_3 Ekspor dan Investasi	Y_3 Jumlah Output Kegiatan Produksi
	Neraca Eksogen	4	L_1 Pengeluaran Eksogen Faktor Produksi	L_2 Impor, Tabungan, Pajak Tidak Langsung	L_3 Transfer dan Neraca Lainnya	R Total Penerimaan	Y_4 Total Output	
	Total	5	Y_1 Distribusi Pengeluaran Faktor Produksi	Y_2 Distribusi Pengeluaran Institusi	Y_3 Jumlah Pengeluaran Kegiatan Produksi	Y_4 Total Pengeluaran Eksogen		

Sumber: Pokok masalah dan tujuan penelitian

Analisis dan Pembahasan

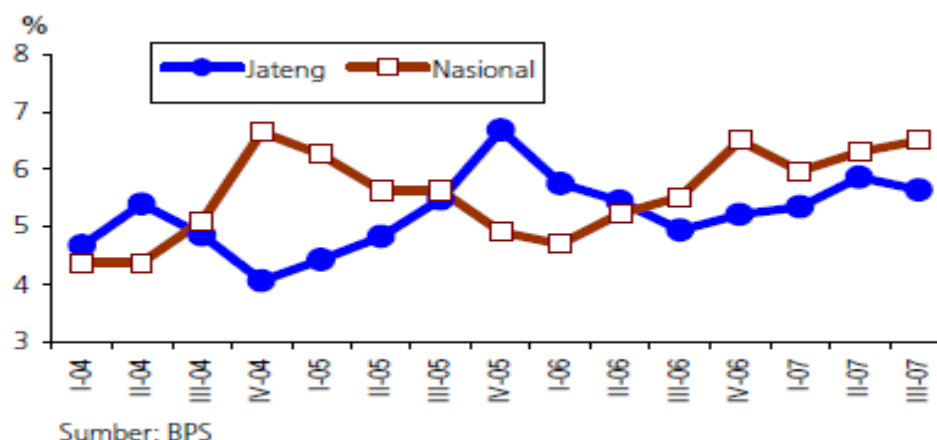
Secara makro, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menilai kinerja perekonomian, terutama untuk menganalisis kinerja pembangunan ekonomi yang telah dilakukan di daerah Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Tengah, telah mengalami peningkatan yang positif dilihat dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang meningkat positif ini merupakan syarat fundamental dalam mengukur kinerja perekonomian daerah Jawa Tengah, sehingga dari peningkatan pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar-2: Sumbangan sektor terhadap PDRB di Jawa Tengah, 2007

Kinerja pertumbuhan ekonomi tahunan di Jawa Tengah secara keseluruhan, didorong oleh empat sektor yaitu; industri, perdagangan hotel & restoran (PHR), sektor jasa-jasa, dan pertanian masing-masing sektor menyumbang 4,22%; 5,73%; 9,43% dan 3,60%. Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (*share of growth*) keempat sektor ekonomi tersebut masing-masing sebesar: 1,36%; 1,20%; 0,95% dan 0,75%. Seperti terlihat pada gambar-2 keempat sektor tersebut merupakan sektor dominan sumbanganya terhadap PDRB di Jawa Tengah. Sedangkan, di sisi penggunaan didorong oleh konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara itu, ekspor neto mengalami pertumbuhan negatif, karena pertumbuhan impor yang lebih tinggi daripada pertumbuhan ekspor. Dari diskripsi tersebut dapat dinyatakan bahwa kinerja perekonomian Jawa Tengah masih baik, namun berada di bawah kapasitas optimal. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar-3, bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada pertengahan 2004 hingga pertengahan 2005 dan pertengahan 2006 hingga akhir 2007 adalah lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi nasional.



Gambar-3: Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional

Struktur fundamental dan kinerja perekonomian

Berdasarkan hasil analisis struktur basis sektor unggulan, kinerja perekonomian Jawa Tengah juga masih bertumpu pada keempat sektor tersebut sebagai landasan struktur perekonomian yang fundamental yakni sektor; industri, PHR, pertanian dan jasa-jasa. Hasil penelitian yang lain (Prasetyo, 2009) di Kabupaten Semarang juga telah menjadikan sektor unggulan tersebut sebagai slogan pembangunan daerahnya yaitu; INTANPARI (Industri, Pertanian dan Pariwisata). Di mana sub sektor pariwisata itu sendiri pada dasarnya masih termasuk ke dalam sektor jasa-jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 65,72 persen atau 23 daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah masih bertumpu pada sektor pertanian, 20 persen atau 7 daerah kabupaten dan kota (terutama Cilacap, Kudus, Jepara dan Kabupaten Semarang) bertumpu pada sektor Industri, dan sebanyak 42,87 persen atau 15 daerah kabupaten dan kota berbasis pada sektor Jasa termasuk pariwisata.

Sementara itu, untuk daerah yang berbasis pada struktur fundamental di sektor industri sehingga memiliki multiplier efek yang cukup besar pada sektor lainnya seperti di Kabupaten Cilacap adalah lebih terkonsentrasi pada industri pertambangan, Kabupaten Kudus dan Jepara berkonsentrasi pada industri manufaktur, sedangkan di Kabupaten Semarang, lebih terkonsentrasi pada industri tekstil dan produk tekstil termasuk garmen. Sedangkan, daerah lain yang memiliki basis pada sektor jasa terutama pariwisata sehingga memiliki multiplier efek yang cukup besar terhadap sektor lain adalah Kota Surakarta, Kabupaten Semarang, Magelang, Banyumas, Kudus dan Jepara.

Namun demikian, untuk melihat kinerja keberhasilan pembangunan dari aspek perekonomian, tidak cukup hanya dari laju pertumbuhan ekonominya, tetapi harus dilihat pula dari besarnya pendapatan per kapita, dan stabilitas perekonomian yang dapat dilihat dari laju inflasi dan pengangguran yang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan perkapita di Jawa Tengah atas harga konstan tahun 2000 telah menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja perekonomian daerah Jawa Tengah berkategori baik.

Tabel-4: Kondisi Struktur Fundamental dan Kinerja Perekonomian Jawa Tengah

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pedapatan Perkapita (harga konstan 2000)		Stabilitas Ekonomi (%)		Tingkat Kemiskinan	
		Jumlah	Perubahan	Inflasi	Pengangguran	Batas	%
2000	3,93	3.628.673,95	-	9,35	5,86	Rp80.382	28,46
2001	3,59	3.768540,06	3,85	11,51	8,10	Rp96.512	25,60
2002	3,55	3.930.584,78	4,30	10,02	8,51	Rp106.438	23,06
2003	4,98	4.100.668,16	4,32	7,59	9,12	Rp119.403	21,78
2004	5,13	4.284.047,89	4,47	6,12	9,43	Rp126.651	21,10
2005	5,35	4.484.910,42	4,69	15,97	10,83	Rp138.726	20,49
2006	5,60	4.682.824,26	4,41	6,50	8,20	Rp151.997	22,19
2007	5,61	4.899.786,58	4,63	6,24	8,10	Rp166.697	20,43

Sumber: BPS Jawa Tengah, beberapa terbitan

Selanjutnya, struktur keberhasilan perekonomian tersebut secara fundamental masih harus dikaji dari sisi stabilitas yang dapat tercermin dari tingkat inflasi dan pengangguran yang terjadi, serta tingkat kemiskinan. Apabila tingkat inflasi lebih rendah daripada tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi, maka kinerja perekonomian daerah Jawa Tengah dapat dikatakan baik. Selain itu, kinerja perekonomian daerah ini dikatakan semakin baik, jika ketika tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat, maka tingkat pengangguran harus menurun. Berdasarkan hasil penelitian, nampak bahwa tingkat laju inflasi masih lebih tinggi daripada laju pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian Jawa Tengah belum stabil. Kondisi belum stabilnya kinerja perekonomian ini juga masih dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah ini belum mampu menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan secara signifikan, bahkan ada kecenderungan tingkat pengangguran yang meningkat dan masih tingginya tingkat kemiskinan. Artinya kinerja perekonomian Jawa Tengah sekalipun baik, tetapi belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Argumentasinya, karena pertumbuhan ekonomi tersebut sesungguhnya digerakan atau didorong oleh investasi. Selain itu, peningkatan pendapatan perkapita belum berarti peningkatan pendapatan pada tiap golongan, karena bentuk pendapatan perkapita kurang dapat menghitung peningkatan pendapatan tiap golongan masyarakat penerima pendapatan. Sebab pendapatan per kapita hanya diperoleh melalui PDRB Jawa Tengah di bandingkan dengan jumlah penduduk Jawa Tengah, sehingga pendapatan per kapita tersebut belum mewakili pendapatan masyarakat per golongan. Oleh karena itu, melalui hasil analisis SNSE akan dijelaskan bagaimana distribusi pendapatan antar tiap golongan.

Selain dilihat dari sisi pendapatan masyarakat, kinerja perekonomian Jawa Tengah dapat dilihat dari kondisi pertumbuhan ekonominya. Berdasarkan data BPS, dan analisis SNSE, kondisi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dalam periode tahun 2000-2007 masih tetap dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan *output* antar sektor yang positif, sekalipun ada beberapa sektor yang kenaikannya dari tahun ke tahun tidak selalu positif. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa perekonomian Jawa Tengah cukup memiliki prospek yang

baik. Pada periode yang sama inflasi mengalami penurunan sebesar 0,36 persen sehingga dapat mendorong laju investasi daerah untuk lebih memacu pertumbuhan ekonomi yang berujung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahannya, mengapa justru pada periode tahun 2006-2007 investasi justru menurun.

Investasi sebagai pendorong utama kinerja perekonomian

Untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, menurut Bank Dunia (2008), pada dasarnya ada empat pilar sebagai komponen yang fundamental yaitu; (i) pengelolaan keuangan, (ii) kinerja fiskal, (iii) kinerja penyediaan layanan publik, dan (iv) kinerja iklim investasi. Namun, dalam penelitian ini hanya digunakan pendekatan pilar investasi. Argumentasinya adalah karena masih banyak Pemda termasuk di Jawa Tengah yang belum menyadari potensi kontribusi mereka dalam peningkatan iklim usaha dan investasi di daerahnya. Hal ini tampak pada usaha-usaha lokal yang berupaya untuk meningkatkan skala operasinya. Karena investasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan potensi sumber pendapatan, sehingga pilar ini merupakan dimensi yang paling fundamental untuk mengukur kinerja pemda dalam bidang perekonomian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi di Jawa Tengah baru menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga peranannya masih sangat kecil. Penerapan sistem *one stop service* (OSS) perijinan investasi di semua kabupaten/kota di Jawa Tengah diharapkan mampu meningkatkan investasi di Jawa Tengah. Namun, harus disadari pula bahwa peningkatan investasi melalui OSS ini tidak dapat terjadi dalam waktu singkat, karena perlu sosialisasi, edukasi dan kampanye, bahwa investasi lebih cepat, mudah, murah melalui OSS. Berdasarkan tabel-5, realisasi investasi dalam PMA yang meningkat. Hasil realisasi investasi PMA di Jawa Tengah secara rerata memiliki *share* 7,87% dari total realisasi investasi PMA secara nasional. Sedangkan, realisasi investasi PMDN memiliki *share* sebesar 1,63% dari total nilai realisasi investasi PMDN nasional.

Tabel-5: Perkembangan Nilai Investasi PMA dan PMDN di Jawa Tengah

No.	Keterangan	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	PMA:						
	Jumlah Proyek	44	57	46	47	51	45
	Nilai Investasi (\$ juta)	91.765	80.018,37	86.867,96	610.432	142.388	107.884
	Jumlah Tenaga Kerja	13.397	20.560	8.889	8.162	20.443	23.642
2	PMDN:						
	Jumlah Proyek	14	21	17	20	15	12
	Nilai Investasi (Rp milyar)	1.541.259	3.607.654	5.608.617	1.912.678	3.821.468	3.489.413
	Jumlah Tenaga Kerja	2.906	24.002	10.441	18.263	22.086	26.733

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKM), 2008

Bedasarkan hasil penelitian dan analisis SNSE, bahwa iklim investasi di Jawa Tengah tergolong cukup kondusif, namun tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan terutama PMDN. Artinya, ada beberapa persoalan mendasar dalam iklim investasi di Jawa Tengah, sehingga dibutuhkan kebijakan yang benar-benar mampu meningkatkan iklim investasi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa persoalan fundamental yang patut diperhatikan. Pertama, perlu ada komitmen dan pemahaman bersama bahwa kemandirian kabupaten/kota hanya dapat dibangun secara kuat/kokoh jika kabupaten/kota tersebut berbasis pada kekuatan ekonomi yang bersifat *sustainable* yang didorong oleh kemampuan investasi. Kedua, harus adanya kepastian peraturan dan pelaksanaan yang jelas dan tegas. Ketiga, perlu adanya tingkat bunga yang rendah untuk investasi produktif. Apabila kebijakan pemerintah melakukan terhadap ketiga hal tersebut, maka iklim investasi di Jawa Tengah akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa penurunan laju investasi ini ternyata berdampak buruk pada semakin meningkatnya pengangguran di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan penurunan ekspor, sehingga perlu dilakukan kebijakan yang mampu mendorong investasi tersebut. Secara umum, penurunan investasi di Jawa Tengah ini dapat dinilai buruk, karena adanya penurunan (PMDN) sebesar 93,11% dan penurunan pada nilai investasi asing (PMA) sebesar 71,74%. Penurunan nilai investasi PMA dan PMDN ini dapat menjadi indikator bahwa iklim investasi masih kurang kondusif, sehingga perlu dilakukan kebijakan untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif.

Dampak dari penurunan investasi ini sekalipun secara umum masih mampu menjaga laju pertumbuhan ekonomi yang positif, tetapi pada kenyataannya telah berdampak negatif pada meningkatnya pengangguran sebesar 0,92% dan penurunan ekspor sebesar 19,2%. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat sebesar 0,17 persen belum mampu meningkatkan pendapatan per kapita tahun 2007 atas dasar harga berlaku yang lebih besar dari tahun sebelumnya yakni hanya sebesar 10,01 persen. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan baru, karena kinerja ekonomi yang cukup baik ternyata tidak diikuti dengan menurunnya jumlah pengangguran dan peningkatan pendapatan per kapita, bahkan di lain pihak menurunkan ekspor dan meningkatnya impor.

Kinerja perekonomian di Jawa Tengah pada tahun 2007 masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, dengan kontribusi terhadap total PDRB sebesar 31,97%; diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) serta sektor pertanian, dan jasa-jasa. Kecenderungan dominasi sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan ini nampaknya dapat berlangsung terus mengingat pertumbuhan investasi di sektor ini lebih besar daripada sektor lain termasuk di sektor pertanian. Fenomena ini sejalan dengan teori kebijakan investasi yang dikemukakan oleh Samuelson (1994). Artinya, peran pemerintah daerah dalam meningkatkan PDRB di Jawa Tengah dapat dalam bentuk modal, seperti dalam pembangunan industri ataupun dalam bentuk investasi langsung seperti proyek-proyek sarana dan prasarana yang langsung maupun tidak langsung akan tetap dapat mendorong perkembangan perekonomian, sekalipun pihak swasta tidak dapat atau tidak berkeinginan untuk melakukan investasi di sektor tersebut.

Tabel-6: Kondisi Investasi Jawa Tengah Tahun 2007
(sesuai bidang usaha)

No.	Sektor Usaha	PMA	PMDN
1	Tanaman Pangan	-	-
2	Perkebunan	-	-
3	Peternakan	42,590,280,000.00	42,637,000.00
4	Perikanan	-	-
5	Kehutanan	-	-
6	Pertambangan	4,229,100,000.00	-
7	Industri makanan	877,259,418,996.00	-
8	Industri tekstil	834,981,926,069.44	199,808,653.00
9	Industri Kayu	112,714,252,500.00	-
10	Industri Kertas	-	-
11	Industri Farmasi	5,950,000,000.00	-
12	Industri Kimia	3,562,500,000.00	42,150,954.02
13	Industri Mineral Non Logam	2,742,000,000.00	-
14	Industri Logam Dasar	190,164,001,464.00	-
15	Industri Barang Logam	118,029,250,000.00	8,469,627.00
16	Industri Lainnya	18,666,700,000.00	666,909,000.00
17	Listrik, gas, air minum	64,610,000,000.00	50,000,000.00
18	Bangunan	-	-
19	Perdagangan	329,886,140,000.00	18,300,000.00
20	Hotel dan Restoran	16,000,000,000.00	125,000,000.00
21	Pengangkutan	-	-
22	Perumahan, kawasan Industri	58,874,060,000.00	-
23	Perkantoran	57,016,648,000.00	-
24	Jasa Lainnya	190,808,496,744.00	38,600,000.00
	Jumlah	2,928,084,773,773.44	1,191,875,234.02

Sumber : BPMD Jateng 2007

Selanjutnya, peran pemerintah terus dilakukan misalkan melalui kebijakan Inpres nomor 3 tahun 2006 tentang perbaikan iklim investasi. Karena argumentasinya adalah bahwa iklim investasi yang baik akan mampu mendorong investasi yang baik pula, yang pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Dalam penelitian ini, yang dimaksud investasi ini berasal dari berbagai sektor usaha yang tergolong dalam PMA dan PMDN seperti dapat dilihat pada tabel-6. Pada tabel-6, tersebut nampak bahwa kondisi investasi dalam negeri (PMDN) di Jawa Tengah tahun 2007, nilai terbesar pada sektor industri makanan Rp877.259.418.996,00 dan terkecil pada sektor Industri Mineral Non Logam sebesar Rp2.742.,000.000,00. Sedangkan, investasi PMA Jawa Tengah, nilai terbesar pada sektor Industri lainnya sebesar Rp666.909.000,00 dan nilai terkecil pada sektor Industri Barang Logam sebesar Rp8.469.627,00. Kondisi ini memperkuat argumentasi hasil penelitian di atas yang menegaskan bahwa, sektor yang masih memberikan sumbangan pertumbuhan positif karena investasinya juga masih cukup besar adalah sektor industri.

Jika diklasifikasikan berdasarkan sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier, maka kondisi investasi di Jawa Tengah akan lebih nampak banyak terjadi pada sektor sekunder dan tersier. Artinya, kondisi investasi ini sebenarnya kurang baik, karena sektor pertanian sebagai sektor primer yang sebenarnya perlu dipacu

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan justru porsi investasinya lebih kecil, sehingga tidak meherankan jika pertumbuhan ekonomi naik, tetapi masalah kemiskinan dan pengangguran di Jawa Tengah masih tetap tinggi dan cenderung meningkat pada periode yang sama. Klasifikasi investasi di sektor primer adalah; tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan. Klasifikasi sektor sekunder adalah; pertambangan, industri makanan, industri tekstil, industri kayu, industri kertas, industri farmasi, industri kimia, industri mineral logam, industri logam dasar, industri barang logam, listrik, gas, dan minum. Klasifikasi sektor tersier adalah bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan, perumahan, kawasan industri, perkantoran, jasa lainnya.

Tabel-7: Perkembangan Investasi Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007
Berdasarkan Agregasi Sistem Neraca Sosial Ekonomi 2004

No	Sektoral	Klasifikasi SNSE	Jumlah (Dalam jutaan)
1	pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, industri makanan	19	Rp962.487
2	pertanian tanaman lainnya, kehutanan, dan perburuan	20	-
3	pertambangan, industri pengolahan kecuali makanan, listrik, gas, dan air minum	21	Rp2.322.988
4	perdagangan, restoran dan perhotelan, pengangkutan dan komunikasi, jasa perseorangan dan RT	22	Rp489.189
5	lembaga keuangan, real estate, pemerintah, jasa sosial dan kebudayaan, jasa hiburan	23	Rp345.299
	Total		Rp4.119.960

Sumber: Perkembangan Investasi Jawa Tengah BPMD 2007, diolah

Jika berdasarkan obyek penelitian yang mencakup 14 sampel kabupaten dan kota, yaitu; Kab. Cilacap, Kab. Tegal, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kab. Brebes, Kota Semarang, Kab. Purbalingga, Kab. Sragen, Kab. Kudus, Kab. Kebumen, Kab. Wonogiri, kab. Batang, Kab. Banjarnegara, dan Kab. Wonosobo. Maka obyek tersebut terdapat 5 kabupaten dan kota yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi dan investasinya tinggi, 5 kabupaten/kota rata-rata pertumbuhan rendah, dan 4 kabupaten/kota yang mendukung investasi tahun 2005 dan inpres tahun 2006.

Berdasarkan hasil analisis pendekatan model SNSE, yang dalam penelitian ini dilakukan proses klasifikasi dengan pendekatan pengelompokan berdasarkan sektor usaha investasi. Tujuan pengelompokan yang dilakukan berdasarkan sektor usaha ini adalah untuk mengetahui jumlah besarnya alokasi dana investasai PMA dan PMDN yang akan digunakan dalam kegiatan produksi setiap sektor usaha. Dengan adanya pengelompokan berdasarkan sektor usaha, maka dampak investasi ini dapat dilihat dengan jelas dan lebih rinci. Perkembangan Investasi Propinsi Jawa Tengah tahun 2007 berdasarkan agregasi Sistem Neraca Sosial Ekonomi(SNSE) yang dimaksud dapat dilihat pada tabel-7.

Selanjutnya, jika berdasarkan analisis Blok, dampak investasi Jawa Tengah tahun 2007 terbesar yang terjadi pada blok faktor produksi akan mengakibatkan total nilai tambah modal swasta dalam negeri mengalami kenaikan sebesar Rp1.510.574,89 atau terjadi kenaikan sebesar 3,0%. Sedangkan, dampak investasi terbesar terhadap kenaikan penerimaan faktor produksi tenaga kerja pada kepemimpinan, ketatalaksanaan, militer, profesional dan teknisi penerima upah gaji dan tata usaha, penjualan, jasa-jasa penerima upah gaji masing-masing sebesar 3,55% dan 3,47%. Artinya, faktor tersebut di Jawa Tengah paling banyak mendapat manfaat dengan adanya kebijakan investasi tahun 2007 daripada faktor produksi lainnya.

Pada blok institusi, dampak kebijakan investasi simulasi pertama, terbesar berada pada sektor pengusaha golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer, militer, profesional, teknisi, guru, pekerja TU dan penjualan golongan atas di kota, yakni sebesar 3,15%. Artinya, jika pemerintah mengenakan kebijakan tambahan sebesar 10%, maka pada blok institusi yang paling besar menerima manfaatnya adalah sektor pengusaha golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer, militer, profesional, teknisi, guru, pekerja tata usaha serta golongan atas yang hidup di kota. Sedangkan, sektor yang menerima manfaat terkecil pada blok institusi ini adalah rumah tangga buruh tani yakni hanya sebesar 2,90%. Namun, jika secara nilai, pengusaha pertanian justru menerima manfaat terbesar yakni sebesar Rp1.289.254,94 dan rumah tangga buruh tani tetap masih sebagai penerima manfaat dampak kebijakan investasi terkecil yakni Rp467.238,60

Pada blok sektor produksi, dampak investasi penerimaan terbesar diterima sektor pertambangan, industri pengolahan kecuali makanan, listrik, gas, dan air minum yakni walaupun secara persentase meningkatnya cukup kecil, yakni hanya sebesar 2,7%, tetapi secara nilainya mampu meningkat sebesar Rp11.386.383,27. Sedangkan, kenaikan terbesar secara persentase didapat pada sektor lembaga keuangan, real estate, pemerintah, jasa sosial dan kebudayaan, jasa hiburan. Sektor ini mengalami kenaikan sebesar 3,75% dengan penerimaan sebesar Rp2.795.515,84. Pertumbuhan sektor produksi yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui jumlah penerimaan yang diterima, yaitu meningkat sebesar Rp29.594.947,52 atau sebesar 3,02%.

Berdasarkan hasil penelitian seperti terangkum dalam tabel-8, maka nampak bahwa pada blok faktor produksi, dampak investasi terbesar akan mengakibatkan total nilai tambah modal swasta dalam negeri mengalami kenaikan sebesar Rp2.311.499,99 atau kenaikan terjadi sebesar 4.64 persen. Sedangkan, dampak investasi terbesar pertama dan terbesar kedua terhadap kenaikan penerimaan faktor produksi tenaga kerja terjadi pada sektor; kepemimpinan, ketatalaksanaan, militer, profesional dan teknisi penerima upah gaji dan sektor tata usaha, penjualan, jasa-jasa penerima upah gaji masing-masing naik sebesar 6,08% dan 5,71%. Artinya, kepada kedua sektor tersebut merupakan sektor yang paling banyak menerima manfaat dari kebijakan injeksi sebesar 10%.

Tabel-8: Dampak Kebijakan Investasi Tahun 2007

Sektoral	Kondisi Awal	Nilai	%	Total Kenaikan
Blok Faktor Produksi				
Pertanian penerima upah dan gaji	6.836.525,38	319.491,18	4.81	6.962.356,64
Pertanian bukan penerima upah dan gaji	24.070.602,58	1.081.732,30	4.62	24.472.423,83
Produksi, operator alat angkutan, manual dan buruh kasar penerima upah dan gaji	28.243.971,51	1.266.081,72	4.62	28.678.505,93
Produksi, operator alat angkutan, manual dan buruh kasar bukan penerima gaji	13.951.915,86	586.980,48	4.33	14.141.726,70
Tata usaha, penjualan, jasa-jasa penerima upah gaji	21.372.632,86	1.179.843,74	5.71	21.834.723,63
Tata usaha, penjualan, jasa-jasa bukan penerima upah dan gaji	22.454.318,55	1.162.894,51	5.36	22.875.113,26
Kepemimpinan, ketatalaksanaan, militer, profesional dan teknisi penerima upah gaji	4.025.157,57	236.527,14	6.08	4.123.749,74
Kepemimpinan, ketatalaksanaan, militer, profesional dan teknisi bukan penerima upah dan gaji	240.820,11	12.007,52	5.14	245.445,44
Modal swasta dalam negeri	51.300.577,39	2.311.499,99	4.64	52.101.502,49
Modal pemerintah dan asing	14.227.028,97	485.334,31	3.49	14.397.805,83
TOTAL I	186.723.550,79	8.642.392,88	4.77	189.833.353,48
Blok Institusi				
Buruh tani	16.592.099,63	738.278,69	4.58	16.863.139,72
Pengusaha pertanian	44.001.839,10	2.017.109,10	4.72	44.729.693,26
Pengusaha bebas golongan rendah, tenaga TU, pedagang keliling, pekerja bebas sektor angkutan, jasa perorangan, buruh kasar, bukan angkatan kerja dan golongan tidak jelas di desa	20.462.430,33	883.542,60	4.44	20.782.670,33
Pengusaha bebas golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer, militer, profesional, teknisi, guru, pekerja TU, dan penjualan golongan kelas atas di desa	16.675.948,69	750.354,62	4.63	16.949.262,11
Pengusaha golongan rendah, tenaga TU, pedagang keliling, pekerja bebas sektor angkutan, jasa perorangan, buruh kasar, bukan angkatan kerja, dan golongan tidak jelas di kota	27.087.453,32	1.263.885,92	4.81	27.548.807,48
Pengusaha golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer, militer, profesional, teknisi, guru, pekerja TU dan penjualan golongan atas di kota	36.654.131,34	1.754.024,78	4.94	37.287.712,90
TOTAL II	161.473.902,41	7.407.195,70	4.73	164.161.285,79
Blok Sektor Produksi				
Pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, industri makanan	252.370.153,26	10.813.913,41	4.41	256.079.234,77
Pertanian tanaman lainnya, kehutanan, dan perburuan	18.918.435,45	1.410.585,57	7.68	19.769.414,79
Pertambangan, industri pengolahan kecuali makanan, listrik, gas, dan air minum	428.129.625,47	15.611.012,51	3.75	432.354.254,71
Perdagangan, restoran dan perhotelan, pengangkutan dan komunikasi, jasa perseorangan dan RT	233.784.952,92	12.133.772,96	5.37	238.170.115,60
Lembaga keuangan, real estate, pemerintah, jasa sosial dan kebudayaan, jasa hiburan	77.262.244,40	4.962.293,30	6.66	79.429.021,86
TOTAL III	1.010.465.411,50	44.931.577,76	3.48	1.014.988.128,32
TOTAL I+II+III	1.358.662.864,70	60.981.166,35	3.46	1.364.485.371,11

Sumber: Rangkuman hasil analisis SNSE

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami peningkatan yang positif antar sektor. Selain itu, kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah telah mampu meningkatkan pendapatan perkapita sejak tahun 2000 hingga tahun 2007. Namun, kinerja pertumbuhan ekonomi tersebut belum berkualitas, sehingga distribusi peningkatan pendapatan perkapita belum merata antar golongan, serta belum efektif untuk mengurangi masalah pengangguran dan kemiskinan yang terjadi. Karena itu, dibutuhkan kebijakan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan.

Berdasarkan hasil analisis SNSE, bahwa kebijakan investasi tersebut berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat, khususnya melalui blok faktor produksi, blok institusi dan blok sektor produksi. Pada blok faktor produksi, dampak kebijakan investasi terbesar terjadi pada faktor produksi kepemimpinan, ketatalaksanaan, militer, profesional dan teknisi penerima upah gaji, dan dampak investasi terkecil terjadi pada faktor produksi produksi, operator alat angkatan, manual dan buruh kasar bukan penerima gaji. Pada blok institusi, dampak kebijakan investasi terbesar terjadi pada institusi pengusaha golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer, militer, profesional, teknisi, guru, pekerja Tata Usaha dan penjualan golongan atas di kota, dan dampak terkecil terjadi pada pengusaha bebas golongan rendah, tenaga Tata Usaha, pedagang keliling, pekerja bebas sektor angkutan, jasa perorangan, buruh kasar, bukan angkatan kerja dan golongan tidak jelas di desa.

Sementara itu, dampak kebijakan investasi terbesar pada blok sektor produksi terjadi pada sektor produksi lembaga keuangan, real estate, pemerintah, jasa sosial dan kebudayaan, jasa hiburan, sedangkan dampak investasi terkecil terjadi pada sektor produksi pertambangan, industri pengolahan kecuali makanan, listrik, gas, dan air minum. Fenomena ini adalah bukti yang memperkuat pendapat masyarakat bahwa kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang investasi baru pada sektor moneter dan belum menyentuh sektor riil. Oleh karena itu, masih perlu terus dipacu dengan berbagai kebijakan investasi yang makin kondusif, murah, aman dan tertib, sehingga ke depan akan mampu mendorong sektor riil secara lebih nyata dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Andi Alfian Parewangi, 2005, "An Analysis of The Direct Subsidy to The Farmers Household in Indonesia: Application of The SAM Model", *Journal of Development Economy*, FE-UI, Jakarta.
- Andi A.P., and Daniel Pambudi, 2004, "The Ilustrative Subsidy Variations to Attrac Investor: An Application of The EMERALD Indonesian Multi-Regional CGE Model", *Journal of Development Economy*, FE-UI, Jakarta.
- Andi A.P., 2005, "Pengantar Aspek Spasial MIT VS Input-Output", *Makalah Pelatihan Input-Output & SNSE*, Lab FE-UI & DIKTI, Depdiknas, Cisarua, Nov-Des.
- Aris Yunanto, 2005, "Konsep Analisis Dampak dan Analisis Pengganda: Output, Pendapatan & Tenaga Kerja", *Makalah Pelatihan Input-Output & SNSE*, Lab FE-UI & DIKTI, Depdiknas, Cisarua, 28 November-1 Desember, 2005

- Bank Dunia, 2008, **“Mengoptimalkan Kontribusi Desentralisasi Bagi Pembangunan: Metodologi Kerangka Kerja Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (LGPM)”**, Decentralization Support Facility (DSF), www.dsfindonesia.org.
- Bautista, R.M., S. Robinson and M. El-Said. 1999, **“Alternative Industrial Development Path for Indonesia: SAM and CGE Analysis”**, TMD Discussion Paper No. 42. International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington D.C.
- Bendavid-Val, Avrom, 1991, **“Regional and Local Economic Analysis for Prationer”**, Fourth edition, Prager, New York.
- Blakely, Edward James, 1994, **“Planning Local Economic Development: Theory and Practice”**, Second edition, Sage Publication.
- Boland, Lawrence A., 1991, **“The Methodology of Economic Model Building”**, Routledge, London and New York.
- Browning, edgar K., and Jacqueline M. Browning, 1983, **“Microeconomic Theory and Applications”**, Little Brown & Company, Canada, USA.
- Djoni Hartono, 2005, “Dekomposisi SNSE: Analisis Dampak dan Analisis Keterkaitan Antar Sektor & Sektor Kunci”, **Makalah Pelatihan Input-Output & SNSE**, Lab FE-UI & DIKTI, Depdiknas, Cisarua
- Gunawan Sumodiningrat, 1998, **“Membangun Perekonomian Rakyat”**, Pustaka Pelajar dan Institut Development Economic Analysis, Yogyakarta.
- Hertel, Thomas W., 1996, **“Global Trade Analysis: Modeling and Applications”**, New York and Cambridge: Cambridge University Press.
- Horridge Mark, 2000, “ORANI-G: A General Equilibrium Model of The Australian Economy”, **Central of Policy Studies and Impact Project Preliminary Working paper No. OP-93**, Monash University, October, Downloadable From: <http://www.monash.edu.au/policy/op-93.htm>.
- Martin, Stephen, 1994, **“Industrial Economics: Economic Analysis and Public Policy”**, Second edition, Macmillan Publishing Company, New York.
- Mudrajad Kuncoro, 1997, **“Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan”**, UPP-APM YKPN, Yogyakarta.
- Prasetyo, P. Eko, 2009, **“Kinerja Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Semarang”**, Jurnal Asset, STIE Widya Manggala Semarang.
- Prasetyo, P. Eko, 2008, **“Struktur Fundamental dan Kinerja Perekonomian Jawa Tengah: Pendekatan analisis Input-Output dan SNSE”**, Laporan Penelitian.
- Robinson Tarigan, 2005, **“Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi”**, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Romer, David, 1996, **“Advanced Macro Economics”**, International edition, McGraw-Hill Book Co, Printed in Singapore.
- Sadoulet, Elisabeth, and Alain de Janvry, 1995, **“Quantitative Development Policy Analysis”**, Johns Hopkins University Press.
- Samuelson Paul A., and William D Nordhaus, 2001, **“Macroeconomics”**, 17th, New York: McGraw-Hill Companies
- Sartika Djamaludin, 2005, “Pengantar Analisis Input-Output dan Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi”, **Makalah Pelatihan Input-Output & SNSE**, Lab FE-UI & DIKTI, Depdiknas, Cisarua, Bogor.